

HUBUNGAN FILSAFAT, ILMU PENGETAHUAN, ILMU ADMINISTRASI DAN FILSAFAT ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Yahya Antu¹, Juliko Suleman², Yana Yanti Suleman³, Nurcholis Suleman⁴, Hasim⁵

Universitas Negeri Gorontalo

yahyaantu03@gmail.com¹, julikosuleman@gmail.com²,
nanang010170@gmail.com³, nurcholis.suleman@gmail.com⁴, hasim@ung.ac.id⁵

ABSTRAK

Filsafat, ilmu pengetahuan, dan ilmu administrasi merupakan konsep yang saling berkaitan dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu administrasi publik. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dasar-dasar filosofis memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu administrasi publik secara khusus. Dalam konteks ini, filsafat menyediakan landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis bagi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai hasil dari perkembangan filsafat, menggunakan pendekatan sistematis untuk memahami fenomena di alam semesta. Pengetahuan, sebagai produk dari interaksi manusia dengan lingkungannya, menjadi bahan baku bagi ilmu. Sementara itu, ilmu administrasi publik, yang berada dalam ranah ilmu sosial terapan, mengintegrasikan pendekatan filsafat dan pengetahuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pengembangan filsafat ilmu administrasi publik yang berorientasi pada nilai-nilai universal, seperti keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas, menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya akan memperkuat landasan teoretis ilmu administrasi publik, tetapi juga meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan praktis di masyarakat. Penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan kontemporer. Dalam era yang ditandai dengan perubahan cepat, pendekatan yang berakar pada filsafat memungkinkan administrasi publik untuk tetap relevan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan filosofis, empiris, dan praktis, ilmu administrasi publik dapat berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang adil, efisien, dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tengah kompleksitas dunia modern.

Kata Kunci: **Hubungan, Filsafat, Pengetahuan, Administrasi, Publik**

ABSTRACT

Philosophy, science, and administrative science are interrelated concepts and are the basis for the development of public administration science. This relationship reflects how

philosophical foundations influence the development of science in general and public administration in particular. In this context, philosophy provides an epistemological, ontological, and axiological foundation for science. Science as a result of the development of philosophy, uses a systematic approach to understand phenomena in the universe. Knowledge, as a product of human interaction with the environment, becomes the raw material for science. Meanwhile, the science of public administration, which is in the realm of applied social sciences, integrates philosophical and knowledge approaches to understand and solve problems of government and public service. In this context, the development of a philosophy of public administration that is oriented towards universal values, such as justice, efficiency, and accountability, becomes very important. This will not only strengthen the theoretical foundation of public administration science, but also increase its relevance and effectiveness in facing practical challenges in society. This research emphasizes that the relationship between philosophy, science, administrative science, and the philosophy of public administration science has significant relevance in answering contemporary challenges. In an era characterized by rapid change, a philosophy-rooted approach allows public administration to remain relevant, responsive, and oriented to the interests of society. By integrating philosophical, empirical, and practical approaches, public administration science can contribute to the creation of fair, efficient, and inclusive policies, thereby improving the quality of people's lives in the midst of the complexity of the modern world.

Keywords: *Relations, Philosophical, Science, Administrative, Public*

PENDAHULUAN

Filsafat, ilmu pengetahuan, dan ilmu administrasi merupakan konsep yang saling berkaitan dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu administrasi publik. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dasar-dasar filosofis memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu administrasi publik secara khusus. Dalam konteks ini, filsafat menyediakan landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis bagi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai hasil dari perkembangan filsafat, menggunakan pendekatan sistematis untuk memahami fenomena di alam semesta. Ilmu Pengetahuan sebagai produk dari interaksi manusia dengan lingkungannya, menjadi bahan baku bagi ilmu. Sementara itu, ilmu administrasi publik, yang berada dalam ranah ilmu sosial terapan, mengintegrasikan pendekatan filsafat dan pengetahuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dan pelayanan publik.

Ilmu administrasi publik memanfaatkan prinsip-prinsip filsafat untuk mengembangkan kerangka teori, metode, dan pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kompleks di masyarakat. Filsafat ilmu administrasi publik, sebagai cabang khusus dari filsafat ilmu, mengeksplorasi sifat dasar dari ilmu administrasi publik, validitas pengetahuan yang dihasilkan, serta implikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hubungan antara filsafat dan ilmu administrasi publik ini

mencerminkan integrasi antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ranah filsafat ilmu administrasi publik, pendekatan multidisipliner menjadi sangat relevan. Hal ini dikarenakan administrasi publik berurusan dengan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan menggunakan dasar-dasar filsafat, ilmu administrasi publik dapat mempertanyakan validitas asumsi-asumsi dasarnya, menilai keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan, serta mengeksplorasi potensi pengembangan baru yang lebih inovatif. Oleh karena itu, memahami hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik tidak hanya penting untuk memperkuat fondasi teoritis ilmu ini, tetapi juga untuk meningkatkan relevansi praktisnya dalam dunia nyata.

Filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik memiliki hubungan yang erat dalam membangun landasan teoretis serta kerangka praktik yang relevan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Filsafat menyediakan landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis bagi ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya memberikan panduan bagi pengembangan ilmu administrasi sebagai cabang ilmu sosial terapan. Filsafat ilmu administrasi publik, sebagai kajian khusus, bertujuan untuk memahami sifat, batasan, dan prinsip-prinsip yang melandasi ilmu administrasi publik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan dan administrasi telah diakui secara luas, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam konteks ini. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya integrasi antara teori dan praktik dalam ilmu administrasi publik. Banyak kebijakan publik yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan landasan filosofis dan pendekatan multidisipliner yang diperlukan, sehingga sering kali gagal dalam implementasi. Selain itu, perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat, terutama dalam era digital dan globalisasi, menuntut ilmu administrasi publik untuk terus menyesuaikan diri dengan tantangan baru, termasuk masalah akuntabilitas, transparansi, dan inklusi sosial.

Penelitian relevan menunjukkan bahwa filsafat ilmu administrasi publik dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Misalnya, penelitian oleh (Denhardt And Denhardt, 2007) menekankan pentingnya pendekatan humanistik dalam administrasi publik, sementara (Rosenbloom, 2014) menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara manajemen, hukum, dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, masih diperlukan lebih banyak studi yang menjembatani kesenjangan antara teori filsafat dan praktik administrasi publik, terutama dalam konteks lokal yang beragam seperti di Indonesia. (David Osborne, 1993) menekankan bahwa era digital memaksa administrasi publik untuk mempertimbangkan aspek-aspek etika dalam penggunaan

teknologi, seperti perlindungan data dan keadilan digital. Ini memerlukan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan digital tetap berorientasi pada kepentingan publik. (Creswell, 2009) menggarisbawahi pentingnya metode penelitian yang sistematis dan berbasis bukti dalam mendukung kebijakan publik. Pendekatan ini memperkuat validitas ilmu administrasi publik sebagai cabang ilmu yang mampu menyelesaikan masalah praktis di masyarakat. (Christopher Pollitt, 2004) menggarisbawahi pentingnya mengeksplorasi asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan teori administrasi publik untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. (Weiss, 1998) menunjukkan bahwa pendekatan filosofis dalam administrasi publik sering kali kurang diterapkan secara spesifik pada situasi lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual, di mana teori dan praktik diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. (Chalmers, 1999) menyoroti bahwa pendekatan tradisional sering kali mengabaikan aspek filosofis dan etis, yang justru penting dalam memastikan kebijakan publik mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks ini, pengembangan filsafat ilmu administrasi publik yang berorientasi pada nilai-nilai universal, seperti keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas, menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya akan memperkuat landasan teoretis ilmu administrasi publik, tetapi juga meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan praktis di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara filsafat, ilmu, pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu ini, tetapi juga bagi perbaikan kualitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan kontemporer. Dalam era yang ditandai dengan perubahan cepat, pendekatan yang berakar pada filsafat memungkinkan administrasi publik untuk tetap relevan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan filosofis, empiris, dan praktis, ilmu administrasi publik dapat berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang adil, efisien, dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tengah kompleksitas dunia modern.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1995). Menurut (Hafiz et al., 2024)

menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review*, *literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Menurut (Sugiyono, 2020) Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian hal ini dikarenakan tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Filsafat

Istilah “filsafat” secara etimologis merupakan persamaan kata *falsafah* (bahasa Arab) dan *philosophy* (bahasa Inggris), berasal dari bahasa Yunani (*philosophia*). Kata *philosophia* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata (*philos*) dan (*sophia*). Kata *philos* berarti kekasih, bisa juga berarti sahabat. Adapun *sophia* berarti kebijaksanaan atau kearifan, bisa juga berarti pengetahuan (Rapar, 2001). Secara harfiah *philosophia* berarti yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Istilah *philosophia* telah diindonesiakan menjadi “filsafat”, ajektifnya adalah “filsafat” dan bukan “filosofis”. Filsafat sangat terkait dengan tradisi pemikiran-pemikiran Barat. Hingga saat ini para ilmuwan menyepakati bahwa filsafat pertama kali hadir di Yunani pada sekitar abad ke-7 SM.

Pada awal kemunculan berkembangnya filsafat, ilmu pengetahuan masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat. Corak pemikiran filsafat pada awal munculnya dikenal dengan istilah alam. Tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar ketika itu yakni, Thales dan Anaximander. Selain itu dalam sejarah filsafat dikenal beberapa kategorisasi dan filosof yang hidup pada kurun waktu berbeda. Kategori tersebut adalah filsafat-filsafat klasik, filsafat abad pertengahan dan filsafat modern (Agriyanto and Rohman, 2017).

Dalam filsafat klasik munculnya Socrates menandai dimulainya filsafat periode klasik. Nama-nama filosof klasik yang terkenal di antaranya adalah, Socrates (470-399 SM), Plato (427-374 SM), Aristoteles (384-322 SM) dan Plotinus (205-70 SM). Sedangkan dalam filsafat abad pertengahan muncul nama-nama besar seperti, John Scotus Eriugena (815-877 M), Santo Anselmus (1034-1109), Roscellinus (1050-1120 M),

Santo Thomas Aquinas (1225-1247 M). Sementara itu pada filsafat modern yang berpengaruh besar adalah, Copernicus (1473-1543), Kepler (1571-1630 M), Galileo Galilei (1564-1642), Rene Descartes (1596-1650 M), Isaac Newton (1643-1727), Immanuel Kant (1724-1804). Filosof periode modern adalah aktor yang paling berperan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, kontribusi mereka hingga sampai saat ini masih bisa dirasakan (Peter K. Machamer, 2000).

Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui filsafat di peradaban Yunani Kuno mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya pergulatan pemikiran di antara para filsuf. Filsuf pertama yang muncul di Yunani Kuno (Pra Socrates) adalah Thales yang hidup pada tahun (624-545 SM). Menurut Thales zat yang membentuk segala sesuatu di alam semesta ini adalah air. Tak sependapat dengan yang dikemukakan oleh Thales, Anaximander (620-546 SM) membantah pendapat Thales dan menyatakan bahwa, substansi asal bukanlah air. Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya diskursus tentang ilmu pengetahuan telah memungkinkan wawasan manusia terus berkembang, seiring lahirnya filsuf-filsuf baru (Carnap, 1995).

Menurut tradisi filsafat yang tua, istilah Yunani *philosophia* digunakan *Phythagoras* untuk menyebut gerak, pencarian akan kebijaksanaan dan kebenaran yang biasa dilakukan oleh manusia. Kebijaksanaan dalam bentuk yang utuh dan sempurna hanya ada pada yang ilahi, sementara manusia yang terbatas sudah merasa puas dengan menegaskan diri sebagai pencinta dan bukan pemilik kebijaksanaan dan kebenaran utuh. Melalui akal budinya, manusia hanya mampu mendekati diri kepada kebenaran yang utuh. Manusia tidak akan pernah meraihnya secara lengkap dan sempurna satu kali untuk selamanya (Zaprul Khan, 2012).

Filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, akan tetapi dengan mengutarakan masalah secara sama, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Setelah membahas sekilas mengenai definisi filsafat (filosofi), maka bisa disimpulkan bahwa filsafat memiliki suatu upaya menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada, melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat adalah jawaban dalam bentuk gagasan atau ide. Adapun tujuan dari filsafat ialah untuk memperoleh kebenaran yang bersifat dasar dan menyeluruh dalam sistem yang konseptual. Filsafat menghasilkan pula kebenaran yang bersifat abstrak, spekulatif akan tetapi tidak mampu mengetahui bagaimana cara mengadakannya.

Pengertian Ilmu pengetahuan

Ilmu berasal dari bahasa arab *'ilm*, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu mengacu kepada suatu hal yang melebihi pengetahuan. Pada zaman dahulu, yang dikatakan orang yang berilmu jelas merupakan orang yang telah dianggap memiliki kemampuan yang didapat melalui syarat-syarat tertentu. Orang yang dianggap berilmu merupakan orang yang lolos ujian dan syarat-syarat yang menunjukkan predikat kelayakan yang dimilikinya (Soyomukti, 2011). Ilmu merupakan kegiatan akal budi untuk menjelaskan kenyataan empiris secara spesifik menurut tiga kriteria utama: rasional, metodis, dan sistematis. Istilah rasional, bisa dikatakan bahwa apa yang diklaim oleh suatu ilmu sebagai kebenaran dapat diterima karena masuk akal, yakni logis, kritis, dan terbuka untuk perbaikan. Jadi, apa yang rasional tidak kebal kritik (T.M. Soerjanto Poespowardojo, 2015).

Sedangkan pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Dalam memahami “pengetahuan” kita perlu memahami tentang tindakan “mengetahui”. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki akibat atau hasil, demikian pula tindakan “mengetahui” tentu saja juga menghasilkan sesuatu, yaitu “pengetahuan”. Pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan untuk mengetahui sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek), misalnya: pengetahuan tentang benda, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, atau pengetahuan tentang peristiwa peperangan (Wahana, 2016). Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak (Makhmudah, 2018).

Ilmu pengetahuan adalah insting akal manusia yang secara sistematis dalam menciptakan kebutuhan (teori) baru sebagai pemenuhan hasrat atas rasa ingin tahu (Wilujeng & Diponegoro, 2014). Ilmu pengetahuan (pengetahuan ilmiah) kelanjutan konseptual dari ciri-ciri “ingin tahu” sebagai kodrat manusiawi. Rasa ingin tahu manusia boleh dikatakan tak pernah ada batasnya. Selalu ingin mencari dan menemukan yang baru. Dalam kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan berbagai peristiwa dan gejala di lingkungan. baik yang menyangkut alam, maupun manusia. Didorong rasa ingin tahunya manusia berupaya untuk menemukan jawabannya. Ilmu pengetahuan terus berkembang melalui kajian-kajian yang dilakukan para ilmuwan (Jalaluddin, 2013). Ilmu pengetahuan digunakan sebagai pijakan manusia untuk mencari teori-teori baru dengan metode dan prosedur tertentu agar memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Disisi lain, ilmu pengetahuan harus bersifat sistematis dan teratur berdasarkan metodologi tujuannya agar mencapai generalisasi keilmuan yang diinginkan.

Ilmu pengetahuan hasil dari rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif yang terdiri dari berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan (Kirom, 2011). Adapun menurut (Surajiyo, 2010) definisi ilmu pengetahuan melibatkan setidaknya enam macam komponen, yakni masalah (*problem*), sikap (*attitude*), metode (*method*), aktivitas (*activity*), kesimpulan (*conclusion*), dan pengaruh (*effects*).

Berdasarkan uraian di atas, ilmu pengetahuan yakni ilmu bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu, yang bisa diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang (*approach*), metode, dan sistem tertentu. Ilmu pengetahuan bisa diciptakan manusia karena didorong oleh rasa ingin tahu manusia yang tidak berkesudahan terhadap objek, pikiran, atau akal budi yang menyangsikan kesaksian indera, karena indera dianggap sering menipu. Ilmu pengetahuan bagi manusia mempunyai kemungkinan untuk mencapai pengetahuan yang lebih sempurna daripada pengetahuan biasa, yang lebih tinggi derajatnya yang hendak memberikan “*insight*” (pemahaman yang mendalam).

Ilmu pengetahuan dibangun atas kerja sama pendekatan akal dan intuisi. Akal memiliki keterbatasan penalaran yang kemudian disempurnakan oleh intuisi yang sifatnya pemberian atau bantuan, sedangkan pemberian dari intuisi masih belum tersusun rapi, sehingga dibutuhkan bantuan nalar untuk menyistematiskan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat pemberian itu (Ladyman, 2002). Dengan pengertian lain, akal membutuhkan intuisi, dan begitu pula sebaliknya, intuisi membutuhkan akal. Keduanya saling membutuhkan bantuan dari pihak lainnya untuk menyempurnakan pengetahuan yang dicapai masing-masing.

Ilmu pengetahuan merupakan sebuah rangkaian konseptual atau teori yang saling berkaitan dan memberi tempat untuk pengkajian secara kritis menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis, objektif dan universal. Ilmu pengetahuan memang berdasarkan “pengetahuan biasa”, yang disempurnakan, diperluas, supaya pasti dan benar, sehingga manusia bisa mendekati apa yang dicita-citakannya. Secara sederhana ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis.

Dalam memperoleh pengetahuan ada tiga masalah pokok yang biasanya harus diperhatikan oleh manusia pencari pengetahuan: (1) apakah yang ingin ia ketahui? (2) bagaimanakah cara memperoleh pengetahuan? dan (3) apakah nilai pengetahuan tersebut bagi dirinya?. Dalam usaha memperoleh pengetahuan dengan menjawab beberapa pertanyaan tersebut, maka manusia akan menghasilkan buah pemikiran salah satunya ialah ilmu. Karena ilmu salah satu dari pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Secara

epistemologis, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan (Hidayatullah and Mada, 2018)

Ilmu pengetahuan terdapat berbagai macam, yang masing-masing berlain-lain lapangan dan metodenya. Selanjutnya bagaimanakah menggolong-golongkan, membedakan ilmu pengetahuan itu. Dunia kita terbagi atas berbagai lapangan pengalaman yang masing-masing diliputi oleh ilmu pengetahuannya sendiri. Terdapatlah ilmu alam, ilmu pasti, sosiologi, ilmu hayat, ilmu bumi, ilmu jiwa, ilmu kedokteran, ilmu pekerjaan sosial, pedagogik dan sebagainya. Jadi tampaklah asas perbedaan itu di antaranya:

- a. Objek atau lapangan ilmu pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan belum cukup karena mungkin terjadi ada dua atau lebih ilmu pengetahuan yang mengenai obyek yang sama, padahal merupakan ilmu pengetahuan yang berlainan. Misalnya: ilmu jiwa, ilmu kedokteran, ilmu mendidik, sosiologi, filsafat. Semua itu mempelajari manusia, obyeknya manusia Bahkan juga ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu hayat, ilmu bangsa-bangsa, itu semua mengenai manusia pula. Maka apakah yang membedakan berbagai ilmu pengetahuan itu. Pada garis besarnya obyek atau lapangan ilmu pengetahuan itu ialah alam dan manusia. Oleh karena ada ahli yang membagi ilmu pengetahuan itu atas dua bagian besar yaitu kelompok ilmu pengetahuan alam dan kelompok ilmu pengetahuan manusia (Salam, 2009). Jadi yang membedakan antara satu ilmu Pengetahuan dengan pengetahuan lainnya adalah obyek material atau lapangan ilmu pengetahuan itu. Apabila obyek materialnya sama maka yang membedakannya ialah obyek formalnya atau sudut pandangannya.
- b. Sudut pandang, untuk menerangkan hal ini lebih lanjut, maka kita harus memperhatikan bagaimana obyek itu dipandang. Jadi asas perbedaan kedua ialah sudut pandang. Inilah yang membedakan antara ilmu-ilmu pengetahuan, menentukan sifat-sifat ilmu dan metode yang dipakai. Misalnya: ilmu kedokteran yang mempelajari manusia dilihat dan sudut tubuhnya yaitu sekadar sakit dan harus disembuhkan. Mengapa sudut pandang ini begitu Penting? Sesungguhnya manusia itu adalah terbatas, dari berbagai barang-barang itu ia hanya dapat melihat satu sudut saja. Sebaliknya satu obyek dapat dipandang dari berbagai-bagai sudut. Mempelajari obyek harus sampai habis-habisan justru arti mempelajari dari berbagai-bagai sudut (Wahana, 2016).

Landasan ilmu pengetahuan terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, tiang penyangga itu ada tiga macam yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

- a. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Ontologi merupakan ilmu hakikat bagian dari metafisika yang mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitasnya.

Ontologi juga mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan atau dengan kata lain menjawab tentang pertanyaan apakah hakikat ilmu itu (Okasha, 2002).

- b. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Sehingga epistemologi di sini mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia, bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya. Pokok bahasan epistemologi meliputi hakikat dan sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan kriteria kesahihan pengetahuan (Mufid, 2013).
- c. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Aksiologi meliputi nilai-nilai, parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik material dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri (Komara, 2014).

Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan

Filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan satu sama lain, bila melihat realitas hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan bahwa semuanya merupakan dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia diartikan dalam sebuah prosesnya dan juga dalam hasilnya. Bila dilihat dari hasilnya, keduanya merupakan hasil daripada berpikir manusia secara sadar. Bila dilihat dari segi prosesnya, menunjukkan suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia (untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan), dengan menggunakan metode-metode atau prosedur-prosedur tertentu secara sistematis dan kritis.

Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Perbedaan yang terdapat dari keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi, dan saling mengisi. Pada hakikatnya, perbedaan itu terjadi disebabkan cara pendekatan yang berbeda. Maka dalam hal ini perlu membandingkan antar filsafat dan ilmu pengetahuan, yang menyangkut perbedaan-perbedaan maupun titik temu di antaranya.

Semua keilmuan sudah dibicarakan di dalam filsafat, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat, berarti ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Misalnya matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, psikologi, dan sosiologi. Ilmu juga bersifat analitis, ilmu pengetahuan hanya menggarap salah satu lapangan pengetahuan sebagai objek formalnya (Fadli, 2021). Sedangkan filsafat belajar dari ilmu pengetahuan dengan menekankan keseluruhan dari sesuatu (sinoptis), karena keseluruhan mempunyai sifat sendiri yang tidak ada pada bagian-bagiannya. Ilmu bersifat deskriptif tentang objeknya agar dapat menemukan fakta-fakta, teknik-teknik, dan alat-alat (Zaprul Khan, 2012)

Filsafat tidak hanya melukiskan sesuatu, melainkan membantu manusia untuk mengambil keputusan tentang tujuan, nilai dan tentang apa-apa yang harus diperbuat manusia. Filsafat tidak netral, karena faktor-faktor subjektif memegang peranan yang penting dalam berfilsafat, ilmu mulai dengan asumsi-asumsi. Filsafat juga mempunyai asumsi-asumsi dan menyelidikinya atau merenungkannya karena ia meragukan terhadap asumsi tersebut. Ilmu pengetahuan menggunakan eksperimentasi terkontrol sebagai metode yang khas. Verifikasi terhadap teori dilakukan dengan jalan mengujinya dalam praktik berdasarkan penginderaan. Sedangkan filsafat dengan melalui akal pikiran yang didasarkan kepada semua pengalaman insani, sehingga dengan demikian filsafat dapat menelaah masalah-masalah yang tidak dapat dicarikan penyelesaiannya oleh ilmu (McKenzie, 2001).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan karena semuanya merupakan kegiatan manusia. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat. Mengapa demikian, karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya. Sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik, dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak, untuk mengetahui hakikat kebenaran. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang teratur.

Ilmu pengetahuan membekali filsafat dengan bahan-bahan yang deskriptif dan faktual yang sangat penting untuk membangun filsafat. Tiap filsuf dan suatu periode lebih condong untuk merefleksikan pandangan ilmiah pada periode tersebut. Sementara itu, ilmu pengetahuan melakukan pengecekan terhadap filsafat, dengan menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Sedangkan Filsafat mengambil pengetahuan yang terpotong-potong dan berbagai ilmu, kemudian mengaturnya dalam pandangan hidup yang lebih sempurna dan terpadu. Dalam hubungan ini, kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kita untuk menengok kembali ide-ide dan interpretasi kita, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang-bidang lain. Sebagai salah satu contoh, konsep evolusi mendorong kita untuk meninjau kembali pemikiran kita, hampir dalam segala bidang. Kontribusi yang lebih jauh, yang diberikan filsafat terhadap ilmu pengetahuan, adalah kritik tentang asumsi, postulat ilmu dan analisa kritik tentang istilah-istilah yang dipakai (Juhaya S. Praja, 2018).

Pengertian Ilmu Administrasi

Agar rangkaian kegiatan penataan dalam suatu kerjasama sekelompok orang dapat berlangsung sebaik-baiknya, perlulah hal ikhwal rangkaian kegiatan penataan itu dipelajari secara teratur. Dengan demikian terkumpullah sekelompok pengetahuan teratur

yang mengandung sistem, asas, prosedur, teknik, dan pedoman dari kerjasama itu. Pengetahuan ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang melakukan kerjasama sehingga tujuan kerjasama itu tercapai sepenuhnya tanpa penghamburan pikiran, tenaga, waktu, benda dan ruang, serta dengan menimbulkan kepuasan bagi mereka. (Gulick, 1937) memberikan ketegasan mengenai ilmu administrasi sebagai berikut: “Administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi, ilmu administrasi adalah sistem pengetahuan, dengan pengetahuan tersebut manusia adalah sistem pengetahuan, dengan pengetahuan tersebut manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada sesuatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerjasama untuk tujuan bersama. Dalam ilmu administrasi negara atau administrasi swasta, hal baik yang menjadi asasnya ialah efisiensi. Tujuan pokok ilmu administrasi adalah terselenggaranya pekerjaan dengan sedikit mungkin pengeluaran tenaga manusia dan benda.”

Beberapa pihak masih berkeberatan terhadap penyebutan ilmu bagi pengetahuan mengenai administrasi, karena pengetahuan ini tidak menghasilkan hukum-hukum yang tepat seperti halnya ilmu pasti atau ilmu alam. Beard menyatakan bahwa selama beberapa puluh tahun terakhir ini beliau menyaksikan bahwa pengetahuan mengenai administrasi telah berkembang luas. Ribuan buku dan karangan telah ditulis oleh ahli-ahli yang pandai. Menurut (Moore et al., 1990) yang pokok bagi pengetahuan tentang administrasi bukanlah persoalan apakah pengetahuan itu memenuhi definisi ini atau itu dari suatu ilmu, melainkan 4 buah pertanyaan yang berikut:

- 1) Apakah ini merupakan suatu bidang yang bermanfaat untuk penelaahan, pengembangan, dan pendidikan?
- 2) Apakah ini mempergunakan, atau dapat diusahakan sehingga mempergunakan metodologi yang sehat?
- 3) Apakah ini mempunyai titik tinjauan, sebuah unsur kesatuan suatu pokok uraian pusat yang secara jelas dapat dibedakan dari bidang-bidang penelaahan lainnya?
- 4) Jika ada, apakah titik tinjauan ini memberikan ciri-ciri mengenai batasnya atau hubungan-hubungannya dengan bidang-bidang penelaahan lainnya.

Hubungan filsafat ilmu dengan ilmu administrasi.

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial ia juga tidak akan bisa hidup tanpa orang lain, dengan kata lain senantiasa membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu. Sementara jumlah barang pemuas kebutuhan tidaklah sebanding dengan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu ilmu yang mampu mengatur bagaimana kebutuhan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan permasalahan satu sama lain. Manajemen merupakan ilmu yang mengatur tentang bagaimana manusia dapat memperoleh kebutuhannya secara efektif dan efisien. Dalam hubungan administrasi dan

manajemen tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi bagian dari administrasi dan saling melengkapi karena hakekat administrasi adalah manajemen dan organisasi. Dimana manajemen mengelola 6 (enam) sumber daya yang ada atau lebih dikenal 6 M.

Hakikat Yang Terkandung Dalam Administrasi Publik

Secara basis ontologi bahwa pengembangan keilmuan administrasi publik dalam konteks filsafat ilmu administrasi, adalah hakikat apa yang dikaji dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola secara baik untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Maka disini birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang berperan terlibat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain secara kolektif. Menurut Suryadi, secara substansial wilayah kajian pekerjaan manajer memiliki variasi kepentingan dari pemerintahan dan masalah-masalah publik, mulai dari pertahanan dan keamanan sampai pada kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan, dari desain dan konstruksi jalan dan jembatan sampai eksplorasi ruang angkasa dan dari masalah pajak dan administrasi keuangan sampai manajemen sumber daya manusia. Administrasi publik menginginkan bagaimana memfokuskan pelayanan yang lebih baik kepada semua manusia warga Negara dengan kreativitas barunya. Kita harus memikirkan jalan terbaik untuk bekerja disemua tingkatan pemerintahan. Kita menghendaki dan mengembangkan kemitraan dengan institusi yang nirlaba dan organisasi-organisasi non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat). Kita harus mulai dengan pola pendekatan Millennium memiliki tingkat kehirauan dari sejumlah pertanggungjawaban dan yang diminta ditunjukkan kepada kita sebagai petugas administrasi publik.

Pola pikir manusia seharusnya dibentuk dalam dua pola pikir. *Pertama*, bagaimana manusia masuk dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, membantu membangun proses tersebut secara sistemik sampai kepada hasil yang maksimal. *Kedua*, manusia masuk ke dalam masyarakat, membantu menyadarkan terkait bagaimana pelayanan publik sebetulnya sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga tidak ada lagi saling benturan antara pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik dengan penerima dari penyelenggaraan tersebut. Ibrahim mengungkapkan, nampaknya perkembangan ilmu administrasi publik bertumpu pada kajian-kajian yang bersifat interdisipliner, yang lebih bermuara kepada studi-studi kasus dalam pencarian kebenaran yang didasarkan pada pengalaman atau upaya penerapannya, sesuai kondisi suatu Negara, bahkan Wilayah, akibat perkembangan prinsip Otonomi/Desentralisasi yang melanda seluruh bagian Dunia baik Negara-Negara maju maupun berkembang. Dalam masa transisi (seperti Indonesia) sebaiknya administrasi publik diawali dengan prosedur dalam memperbaiki sistem (perumusan visi misi, strategi kebijakan pembangunan secara komprehensif integral, baru

diikuti pelenturan struktur organisasi, teknik, dan metode-metode serta modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Administrasi publik mengupayakan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kolektif menjadi kegiatan pemerintahan yang bersifat manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksanaanya. Dalam mekanisme kerjanya diperlukan partisipasi *stake holders* pembangunan, sumber daya manusia sebagai penyelenggara di sokong oleh *stake holders* yang berkualitas. Maka secara garis dan basis ontologi penguatan itu akan terjadi sebagaimana mestinya, dengan bangunan yang kokoh akan menjadi suatu kesatuan dalam pengembangan keilmuan administrasi publik.

Secara basis epistemologi berpengaruh terhadap cara bagaimana ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini. Jika selama ini ilmuwan administrasi publik lebih berkuat pada diskusi yang bersifat filosofis tentang administrasi, standar etika dan norma bagi manajer publik dalam menjalankan tugasnya, maka ke depan jika administrasi publik berubah menjadi manajemen publik, orientasi keilmuan dari disiplin ini juga akan bergeser pada hal-hal yang lebih empirikal tentang bagaimana mengembangkan keilmuan untuk membantu manajer publik mencapai tujuan organisasi, bagaimana meningkatkan kemampuan manajerial mereka dan bagaimana meningkatkan akuntabilitas para manajer publik tersebut di depan masyarakat.

Filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya, dari sudut intinya yang mutlak, terdalam tetapi tidak berubah (*Notonegoro*), atau perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab “ada” dan “perbuat”. Kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai kepada “mengapa” yang penghabisan (*Drijarkara*). Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kecauan pengertian sehari-hari. Selanjutnya bila kita berbicara tentang administrasi publik secara filsafati maka para administrator publik yang menjalankan roda administrasi publik harus selalu bijaksana sehingga kebijakan yang diambil dalam pengambilan keputusan administrasi, skala prioritas, dan alternatif pilihan berangkat dari pengkajian kebenaran itu sendiri dengan dasar kebijaksanaan.

Bila dalam filsafat dikaji melalui kebenaran, termasuk kebenaran yang hakiki maka mutlak Allah sebagai penentunya, kendatipun agama membahas hal-hal yang gaib, namun pembahasan administrasi publik dihubungkan dengan hal ikhwal kegaiban. Sehingga sekularisme ditolak. Dengan begitu etika administrasi publik sebagai cabang ilmu filsafat hanya mengacu kepada norma saja, tetapi jika kepada nilai-nilai luhur agama apalagi kita sadari bahwa norma berbeda pada berbagai ruang dan waktu. Sedang agama cenderung relatif lebih universal. Etika, termasuk etika birokrasi mempunyai dua fungsi. *Pertama*, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi Negara (birokrasi publik)

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. *Kedua*, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Etika pelayanan publik dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Agus, dkk menyebutkan, etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Etika birokrasi (administrasi publik) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi.

Secara basis aksiologi menjelaskan bahwa untuk menciptakan para birokrat-birokrat yang mana mereka bertanggung jawab, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap realita-realita yang ada di dalam masyarakat. Setelah mengamati realita-realita yang ada di dalam masyarakat tersebut maka harus dikaitkannya dengan konsep-konsep teori yang ditawarkan lalu membuat kebijakan atas realita yang terjadi di masyarakat tersebut. Sehingga disini, tidak hanya sekedar eksistensi atau popularitas saja yang ditonjolkan oleh para birokrat-birokrat. Tetapi mereka harus memahami bagaimana masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik, minimalnya para birokrat memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan bersama.

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhannya pun semakin bertambah. Kebutuhan yang bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhannya, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut kadang kala etika yang akhirnya akan membawa dampak pada hubungan antara penempatan persoalan kebenaran dan kenyataan yang dialami. Persoalannya etika akan menjadi dasar manusia dalam bertindak. Syafii menyebutkan bahwa, pada kajian etika kebaikan moral ini, kita akan bergelut dengan kegiatan hati (*qolbu*), nilai (*value*), jiwa (*nafs*), sikap (*attitude*), mulai dari kegiatan memperhatikan fenomena sederhana sampai dengan kompleks dalam faktor internal seseorang yang menyentuh kepribadian dan hati nurani. Kemanfaatan kajian mengenai sistem administrasi publik, pada hakikatnya terletak pada kesadaran adanya pengaruh besar dari karakteristik masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, kita sadar bahwa faktor-faktor kondisi setempat akan merupakan faktor penentu bagi administrasi publik, di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang kongkrit terhadap konsep administrasi publik itu, sehingga menjadi sistem-sistem yang terstruktur.

Berfikir secara sistem, berarti berarti berfikir secara menyeluruh terhadap hal-hal yang didekati tidak lagi bermula dari bagian-bagian, tetapi sebaliknya berasal dari keseluruhan. Kenyataan ini semakin menonjol di saat ketika kehidupan menjadi semakin kompleks dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat datangnya. Kebutuhan dan kepentingan manusia bergerak dengan satu ritme yang Dunia belum pernah menyaksikan sebelumnya. Teknologi memang menawarkan berbagai jalan keluar. Namun ternyata tidak seluruhnya berhasil secara memuaskan. Bersamaan dengan itu, setelah Perang Dunia II berakhir, spesialisasi dikembangkan terus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba teknologi.

(Fadli, 2021) menyebutkan, elemen pokok dalam administrasi publik adalah bahwa setiap organ pemerintahan, tanpa memandang tingkatannya, harus melayani urusan publik. Rakyat, sebagai pembayar pajak, mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang Negara dipergunakan. Karena itu pula, mereka berhak mengkritik perilaku pejabat pemerintah serta merasa berhak berpendapat terhadap keputusan yang tidak disetujuinya. Satu diantara keterbatasan untuk menganalisa efisiensi administratif adalah ia mengambil kebijaksanaan atau tujuan dari organisasi sebagai bersifat tetap, dan memusatkan perhatian pada seberapa efektifkah ia dapat dilaksanakan. Tetapi ini sama dengan memperlakukan administrasi seolah-olah ia hanya merupakan sebuah masalah pelaksanaan kebijaksanaan ataupun tujuan-tujuan yang telah dicapai, dan mengabaikan kontribusinya terhadap perumusan awal. Sekalipun kita dapat menarik perbedaan jelas antara politisi dan para pejabat dalam artian metoda pengangkatan dan hakikat tanggung jawab mereka masing-masing, tetapi perbedaan itu tidak lantas bersifat koinsidental dengan garis yang ditarik antara perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan.

Prinsipnya filsafat mengajarkan bagaimana pembentukan keilmuan secara sistematis dan sistemik dalam bangunan keilmuan administrasi, sehingga filsafat bisa dijadikan metode pembentukan ilmu administrasi. Jika dikaitkan dengan keilmuan administrasi publik, filsafat berperan dalam dua sisi sebagai hakikat dan makna. Hakikatnya terkait apapun itu dalam pengembangan keilmuan administrasi publik adalah untuk kepentingan bersama. Maknanya disini bagaimana semua bisa dikonstruksi keilmuan itu untuk mampu bersaing, untuk mampu menciptakan sebuah tatanan baru yang nantinya kebudayaan proses penyelenggaraan yang bersifat publik bisa dilakukan secara kolektif dan kedepan akan berjalan dengan semestinya.

Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan, Ilmu Administrasi Dan Filsafat Ilmu Administrasi Publik Di Era Teknologi Digital Saat Ini

Era teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi publik. Transformasi digital ini menuntut pendekatan baru dalam memahami hubungan antara filsafat, ilmu, pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik. Hubungan tersebut menjadi semakin

relevan untuk merespons kompleksitas yang muncul, seperti tantangan etika teknologi, kebutuhan inovasi kebijakan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Filsafat sebagai Landasan Etika dan Nilai di Era Digital

Filsafat, khususnya dalam ranah epistemologi dan aksiologi, memberikan landasan penting untuk memahami dampak teknologi digital dalam administrasi publik. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, dan *blockchain*, muncul pertanyaan etis mengenai privasi, keadilan digital, dan distribusi sumber daya. Filsafat membantu menggali prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai universal yang harus menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi di sektor publik, seperti perlindungan data pribadi, keadilan dalam akses, dan akuntabilitas.

Ilmu pengetahuan sebagai Alat untuk Mengolah Pengetahuan Digital

Ilmu pengetahuan, sebagai hasil dari proses sistematis, memungkinkan administrasi publik untuk mengolah data besar (*big data*) yang dihasilkan oleh teknologi digital. Proses ini membutuhkan metodologi ilmiah yang kuat untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Teknologi digital memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat, tetapi tanpa landasan ilmiah yang valid, hasilnya dapat menyesatkan.

Ilmu Pengetahuan sebagai Sumber Daya Strategis

Di era digital, Ilmu pengetahuan menjadi salah satu sumber daya strategis yang paling berharga. Administrasi publik harus memanfaatkan pengetahuan yang dihasilkan melalui teknologi digital untuk menciptakan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ilmu Pengetahuan ini memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Namun, ilmu pengetahuan tersebut harus diolah dengan pendekatan kritis dan etis, yang merupakan kontribusi dari filsafat ilmu.

Ilmu Administrasi dalam Era Transformasi Digital

Ilmu administrasi memainkan peran sentral dalam mengelola perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Dalam konteks ini, administrasi publik harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru, seperti *e-governance*, layanan berbasis aplikasi, dan sistem pengelolaan data terpadu. Teknologi ini mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, tanpa landasan filosofis dan pengetahuan yang kuat, implementasi teknologi ini dapat menjadi kontraproduktif, seperti munculnya bias algoritma atau pelanggaran privasi.

Filsafat Ilmu Administrasi Publik sebagai Refleksi Kritis

Filsafat ilmu administrasi publik berperan dalam merefleksikan dampak teknologi digital terhadap praktik administrasi publik. Melalui pendekatan filsafat, dapat dilakukan evaluasi terhadap asumsi-asumsi dasar dari penggunaan teknologi, seperti apakah teknologi benar-benar meningkatkan keadilan, inklusi sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Filsafat ilmu administrasi publik juga menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Integrasi dalam Era Digital

Hubungan antara filsafat, ilmu, pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik menjadi semakin penting untuk menciptakan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan di era digital. Dengan mengintegrasikan landasan filosofis, metode ilmiah, dan pengelolaan pengetahuan, administrasi publik dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan global, seperti ketidakesetaraan digital, perubahan iklim, dan keamanan siber.

SIMPULAN

Hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu administrasi, dan filsafat ilmu administrasi publik memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menghadapi tantangan global, teknologi, dan sosial yang semakin kompleks. Filsafat memberikan landasan dasar berupa kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang memungkinkan ilmu administrasi publik untuk berkembang secara sistematis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari filsafat, memberikan metode dan prosedur yang memungkinkan pemahaman empiris terhadap masalah-masalah sosial yang kompleks, menjadi bahan utama dalam membangun solusi kebijakan publik yang relevan.

Ilmu administrasi publik, sebagai cabang ilmu sosial terapan, memainkan peran kunci dalam menyusun kebijakan yang lebih efisien dan adil. Dengan dukungan filsafat ilmu administrasi publik, kajian terhadap validitas asumsi, metode, dan hasil kebijakan dapat dilakukan secara mendalam untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, terdapat tantangan berupa kurangnya integrasi antara teori filosofis dan praktik lapangan, serta perlunya pendekatan multidisipliner yang lebih kontekstual untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, hubungan antara filsafat dan administrasi publik menjadi semakin penting untuk memastikan penggunaan teknologi dalam kebijakan publik tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan inklusivitas. Dengan demikian, pendekatan filosofis tidak hanya memperkuat fondasi teoritis ilmu administrasi publik tetapi juga meningkatkan kemampuan ilmu ini untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Penelitian

yang lebih mendalam dan adaptasi terhadap konteks lokal diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga administrasi publik dapat terus berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., & Rohman, A. (2017). Rekonstruksi Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Perekonomian Yang Berkeadilan (Kajian terhadap Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Ekonomi yang Islami). In *At-Taqaddum* (Vol. 7, Issue 1, p. 35). <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>
- Carnap, R. (1995). *An Introduction to the Philosophy of Science*. Dover Publications.
- Chalmers, A. F. (1999). *A. E Chalmers What is this thing called Science ? third edition*.
- Christopher Pollitt, G. B. (2004). *Public Management Reform: A Comparative Analysis* (2 edition).
- Creswell, J. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- David Osborne, T. G. (1993). *Reinventing Government: The Five Strategies for Reinventing Government*. Penguin Publishing Group.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, A. R. B. (2007). New Public Service. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition (Print Version)*. <https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch268>
- Fadli, M. R. (2021). Hubungan Filsafat Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Relevansinya Di Era Revolusi Industri 4.0 (Society 5.0). 31(1), 130–161. <https://doi.org/10.22146/jf.42521>
- Gulick, L. (1937). Notes on the theory of organization, in Luther Gulick and Lyndall Urwick. *Public Administration*, 68(2), 1–35.
- Hafiz, A. I., Apdi, I. S., & Hati, R. P. (2024). Makalah. *Jurnal Ilmiah Karawang (JIKA)*, 02, 34–41.
- Hidayatullah, S., & Mada, U. G. (2018). Relasi Filsafat dan Agama (Perspektif Islam). *June*. <https://doi.org/10.22146/jf.31271>
- Jalaluddin. (2013). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Rajawali Pers.
- Juhaya S. Praja. (2018). *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. PrenadaMediaGroup.
- Kirom, S. (2011). Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 21(2). <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3111/9363>
- Ladyman, J. (2002). *Understanding Philosophy*. Routledge 11 New Fetter Lane, London Ec4p 4ee.
- Makhmudah, S. (2018). *Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam*. 4, 202–217.
- Mardalis. (1995). *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- McKenzie, S. F. and K. (2001). *Steven French and Kerry McKenzie*. 1–37.
- Moore, R. A., Mosher, F. C., & Mosher, F. C. F. (1990). *Frederick C. Mosher. September*, 631–633.
- Mufid, F. (2013). Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 17, 19–43.

- Okasha, S. (2002). *Philosophy of Science*. Oxford University Press Great Clarendon Street, Oxford ox2 6DP.
- Peter K. Machamer, M. P. & A. B. (2000). *Scientific controversies: philosophical and historical perspectives*. New York: Oxford University Press.
- Prof. Dr. H. Endang Komara, M. S. (2014). *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*.
- Rapar, J. H. (2001). *Pengantar Filsafat* (cetakan 2). Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Rosenbloom, D. (2014). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. <https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Salam, D. H. B. (2009). *Pengantar filsafat*. Jakarta : Bumi aksara.
- Soyomukti, N. (2011). *Pengantar Filsafat Umum*. Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Surajiyo. (2010). *Filsafat ilmu dan perkembangannya di indonesia* (Ed. 1 Cet.). Jakarta : Sinar grafika.
- T.M. Soerjanto Poespowardojo, A. S. (2015). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Hakikat ilmu pengetahuan, kritik terhadap visi positivisme logis, serta implikasinya*. Kompas Gramedia.
- Wahana, P. (2016). Filsafat Ilmu Pengetahuan. *Pustaka Diamond*, 83. <https://repository.usd.ac.id/7333/1/3>. Filsafat Ilmu Pengetahuan (B-3).pdf
- Weiss, C. H. (n.d.). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*, (2nd Editio). Prentice Hall.
- Wilujeng, S. R., & Diponegoro, U. (2014). *Ilmu Dalam Perspektif Filsafat (Suatu Upaya Mengembalikan Ilmu pada Hakikatnya)* Sri Rahayu Wilujeng. 20(2).
- Zaprul Khan. (2012). *Filsafat Umum Sebuah Pendekatan Tematik*. RajaGrafindo Persada.